

Daftar Putaka

Buku

- Anonim, 2021, *Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, United States, New York.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, 2015, *Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation*, United Nations, New York.
- Anonim, 2019, *Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tanpa kota terbit.
- _____, 2020, *Profil Kemiskinan Klaten 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Klaten.
- Ardhan, Adery, *et al.*, 2018, *Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP Terhadap Rancangan KUHP versi 28 Mei 2018*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Basundoro, Purnawan, 2013, *Merebut Ruang Kota : Aksi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Tahun 1900-1960an*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Broadman, Anthony E., *et al.*, 2018, *Cost-Benefit Analysis : Concept and Practice*, Cambridge University Press, New York.
- D, Soedjono, 1970, *Pathologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,

Jakarta.

Hoefnagels, G Peter, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer B.V., Deventer.

Munthe-Kaas, Heather Menzies, *et.al.*, 2018, *Effectiveness of Interventions to Reduce Homelessness : Systematic Review and Meta-analysisi*, Norwegian Institute of Public Health, Oslo.

Jamaludin, Adon Nasrullah, 2017, *Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Pustaka Setia, Bandung.

Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.

Harahap, M Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muladi, dan Arief, Barda Nawawi., 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, dan Sulistyani, Diah, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Universitas Semarang Press, Semarang.

Mutijo dan Maysaroh, Siti, 2020, *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Panggabean, Mompang L, 2005, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta.

Moeliono, Tristam Pascal, 2021, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrech dan Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch Indie*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Rachman, Noer Fauzi, dan Luthfi, Ahmad Nashih, 2020, *Nanos Gigantos Humeris Insidentes*, STPN Press, Sleman.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sekretariat DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (26 Agustus 1970-28 Oktober 1971)*

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.

Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

———, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel jurnal

Anggriana, Tyas Martika dan Dewi, Noviyanti Kartika, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis,” *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, no. 1 Juli 2016.

Delisle, Claire, *et al.*, “The International Conference on Penal Abolition (ICOPA) : Exploring Dynamics and Controversies as observed at ICOPA 15 on Algonquin Territory.” *Champ pénal/ Penal field* Volume XII, 2015. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.21>.

Folter, Rolf S. De. “On the methodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice system. A comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault.” *Contemporary Crises*, Volume 10, nomor 1, 1986, <https://doi.org/10.1007/BF00728495>.

Gunarto, Marcus Priyo, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.

Guinness, Patrick, “The Gelandangan of Yogyakarta,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 19, Nomor 1, April 1983.

Johnsen, Sarah, *et al.*, “Homelessness and Social Control : A Typology.” *Housing Studies*, Volume 33, Nomor 7, 2018.

Kuntari, Sri dan Hikmawati, Eny, “Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng),” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 41, Nomor 1, April 2017.

Maesele, Thomas, *et al.*, “From Vagrancy to Homelessness : The Value of A Welfare Approach to Homelessness.” *British Journal of Social Work*, Volume 44, Nomor 7, Oktober 2014.

Suparlan, Parsudi, “The Gelandangan of Jakarta : Politicts Among The Poorest People in The Capital of Indonesia,” *Jurnal Indonesia*, Nomor 18, Oktober, 1974, pp. 41-52, <https://www.jstor.org/stable/3350692>.

Podgorecki, Adam. "Law and Social Engineering." *Human Organization*, Volume 21, Nomor 3, Fall 1962, : pp 177-181. <https://www.jstor.org/stable/44124434>.

Quilgars, Deborah, dan Pleace, Nicholas, "Housing First and Social Integration : A Realistic Aim?" *Social Inclusion*, Volume 4, Issue 4, 2016.

Salehijam, Maryam. "The Value of Systematic Content Analysis in Legal Research." *Tilburg Law Review*, Volume 23, Nomor 1, 2018.

Hasil penelitian/tugas akhir

Ardiana, Widha Dessy, 2018, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Progam Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

DH, I Gusti Agung, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, Tesis, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Maniawasi, Ferdinand, 2018, *Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Progam Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta.

Mujiyanti, 2012, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kali Code Tahun 1980-1992*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

SD, Faiz Amrizal, 2017, *Upaya Koersif Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Tesis, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, 2017, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

Wibowo, Mardian, 2008, *Studi Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Jakarta Timur*, Tesis, Progam Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Artikel dalam antologi dengan editor

Garland, David. "Punishment and Welfare: Social Problems and Social Structures." dalam Liebling, Alison, *et.al.*, 2017, *The Oxford Handbook of Criminology Sixth Edition*, Oxford University Press, Oxford.

Lacey, Nicola, dan Zedner, Lucia, "Criminalization: Historical, Legal, and Criminological Perspectives." dalam Liebling, Alison, *et al.*, 2017, *The Oxford Handbook of Criminology Sixth Edit*, Oxford University Press, Oxford.

Onghokham, "Gelandangan Sepanjang Zaman," dalam Paulus Widiyanto, 1986, *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*, LP3ES, Jakarta.

Parsudi Suparlan, "Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota." dalam Paulus Widiyanto, 1986, *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*, LP3ES, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Reformasi Sebagai Proses Pemaknaan Ulang Fungsi Konsitusi", dalam Kasim, Ifdhal, *et al.*, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta.

Internet

Aditya, Ivan, "Gelandangan dan Pengemis Serbu Yogya Ditengah Wabah Corona," 2020. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/gelandangan-dan-pengemis-serbu-yogya-ditengah-wabah-corona/>.

Anonim, "Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2016." Diakses 22 Desember 2020. <https://jateng.bps.go.id/indicator/27/819/1/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

_____, *Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018*. Tanpa Kota Terbit: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019.

_____, "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2018." Diakses 22 Desember 2020, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi.html>.

_____, "Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat, 2016." Diakses 22 Desember 2020, <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/405/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016.html>.

_____, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial." Diakses 22 Februari 2020. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5.

_____, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur, 2017.” Diakses 22 Desember 2020.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>.

_____, “Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang,”
<https://buku.bamsbung.id/daftar-anggota-2/>.

Meliana, Diamanty. “Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia.” Diakses 13 Desember 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>.

Suryani, Bhukti. “Angka Kemiskinan di Jogja Melonjak Melebihi Rata-Rata Nasional, Begini Tanggapan Pemda DIY,” 2021.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/15/510/1063767/angka-kemiskinan-di-jogja-melonjak-melebihi-rata-rata-nasional-begini-tanggapan-pemda-diy>.

Peraturan perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan
Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, dan Pedagang Asongan.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak
Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang
Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007
Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dengan Rahmat Tuhan
Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik
Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKB/X/2012 , M.HH-07. HM.03.02 Tahun 2012, KEP-
06/E/EJP.10/2012, B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat,
Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun
2022 (Versi 4 Juli).

Rancangan Undang Undang Tentang Penampungan Orang-Orang Gelandangan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Pasal
505 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, 3 Januari 2013

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 5/Pid.C/2018/PN.Pbl. Perihal
mengadili perkara tindak pidana ringan MOCH. SUKRONI, 13 Maret 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 05/Pid.C/2015/PN. Smp Perihal
mengadili perkara tindak pidana ringan RONAL ALULA dan SUSI
SUSANTI, 04 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 531/Pid.C/2018/PN. Tlg Perihal
mengadili perkara tindak pidana ringan KRISDIANTORO, 6 Juni 2018.